#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari kelompok rentan, segmen masyarakat yang seringkali dirugikan, terutama dalam hal pemenuhan hak dasar dan perlakuan yang adil. Mereka sering mengalami diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam masyarakat. Banyak orang masih memandang orang dengan disabilitas sebagai individu yang lemah atau berbeda, yang pada gilirannya memperkuat stigma negatif dan meningkatkan kemungkinan perlakuan tidak adil terhadap mereka. Kesalahpahaman ini berkontribusi pada kesulitan mereka dalam memperoleh hakhak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara, serta membatasi peluang mereka untuk berkembang dan hidup secara mandiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi orang dengan disabilitas, sehingga mereka tidak hanya diakui keberadaannya tetapi juga benar-benar diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. (Ndaumanu, 2020).

Anak-anak adalah generasi penerus yang akan memainkan peran penting sebagai penggerak dan pemimpin dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Sebagai investasi bagi negara, anak-anak selayaknya mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan pengembangan yang memadai bagi setiap individu, karena masa

depan negara akan bergantung pada mereka sebagai generasi muda. Dengan mempersiapkan penerus yang berkualitas bagi bangsa, hal ini tentu akan memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap kondisi negara di masa depan. (Zenaida dkk., 2023)

Di sisi lain, anak-anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dibesarkan dengan sebaik-baiknya. Tidak semua anak normal; terkadang, orang tua perlu memiliki hati yang besar dan bersabar dalam mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK). Anak-anak dengan kebutuhan khusus sering menunjukkan perbedaan, baik dalam hal fisik, mental, maupun aspek sosial-emosional. Mereka memiliki karakteristik khusus yang mungkin memerlukan penyesuaian di beberapa area agar mereka dapat menikmati hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Penyesuaian ini juga harus dapat mengoptimalkan perkembangan mereka, sama seperti anak-anak pada umumnya. (Sureti Rambu Guna dkk., 2019).

Menurut Sensus Penduduk Bentuk Panjang 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat 933.893 individu yang diklasifikasikan sebagai penyandang disabilitas. Angka ini menunjukkan bahwa banyak warga negara masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara fisik maupun mental. Dari total tersebut, mayoritas atau 584.503 orang (sekitar 62,59%) mengalami disabilitas fisik, seperti kelumpuhan, kelainan pada anggota tubuh (tangan atau kaki), dan kondisi fisik lain yang memengaruhi mobilitas. Selain itu, 159.918 orang, atau sekitar 17,12%, menghadapi keterbatasan sensorik, termasuk gangguan penglihatan, pendengaran, dan bicara. Disabilitas

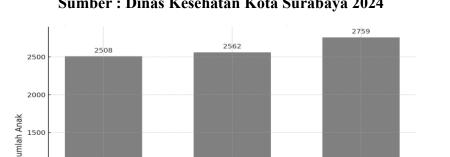
yang disebabkan oleh gangguan mental juga menjadi perhatian, dengan 109.530 orang, atau sekitar 11,73% dari populasi, mengalami kondisi seperti autisme, depresi berat, gangguan bipolar, dan skizofrenia. Selain itu, 79.942 orang, atau 8,56%, terdaftar sebagai memiliki disabilitas intelektual, termasuk individu dengan sindrom Down dan gangguan perkembangan kognitif lainnya. Data ini menyoroti pentingnya menciptakan sistem dukungan yang inklusif dan adil, memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari keterbatasannya, dapat hidup dengan martabat dan kesetaraan.

Pada tahun 2022, berdasarkan data dari BPS 2021, Pemerintah Kota Surabaya melaporkan jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang terdaftar di lembaga pendidikan dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Terdapat 76 sekolah dasar inklusif dengan total 2.206 siswa. Sementara itu, pada tingkat SMP, terdapat 56 SMP inklusif dengan total 1.096 siswa.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan program layanan yang dapat mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang mereka hadapi, dengan harapan dapat berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Surabaya. Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan menyediakan konsultasi kesehatan rutin dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Surabaya.

Pendidikan adalah hak dasar yang harus dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas di Indonesia. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 269.398 anak dengan disabilitas yang terdaftar di sekolah inklusif atau Sekolah Layanan Khusus (SLB). Menurut data BPS tahun 2017, angka ini masih jauh dari total populasi anak-anak dengan kebutuhan khusus di Indonesia, yang mencapai 1,6 juta. Akibatnya, jutaan anak dengan disabilitas di Indonesia belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya mengalami peningkatan jumlah kasus disabilitas setiap tahunnya. Fenomena ini dapat dilihat dari data yang tercantum dalam diagram, yang menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam jumlah orang dengan disabilitas dari tahun ke tahun. Situasi ini menyoroti pentingnya menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai untuk mendukung kebutuhan orang dengan disabilitas di kota ini secara berkelanjutan.



2023 Tahun 2024

1000

500

2022

Gambar 1.1 Data Jumlah Anak Disabilitas Kota Surabaya Tahun 2022-2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya 2024

Kesenjangan ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Pertama, masih terdapat banyak sekolah di Indonesia yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif. Misalnya, ketersediaan alat bantu belajar yang sesuai untuk anak-anak dengan disabilitas masih sangat minim. Kedua, jumlah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) masih sangat terbatas. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami kebutuhan, metode, dan pendekatan yang tepat dalam mendidik anak penyandang disabilitas. (Busmayaril & Umairoh, 2018)

Kurangnya pemahaman seringkali menjadi hambatan dalam implementasi proses pembelajaran inklusif. Selain itu, stigma sosial terhadap disabilitas tetap menjadi hambatan yang signifikan. Banyak orang tua, sekolah, dan masyarakat umum masih memandang anak-anak dengan disabilitas sebagai beban atau meragukan potensi mereka dibandingkan dengan anak-anak lain. Sikap ini tidak hanya membatasi partisipasi mereka dalam pendidikan formal tetapi juga memperkuat siklus marginalisasi yang dialami oleh orang dengan disabilitas. (Yapalalin dkk., 2021).

Dalam konteks ini, perbaikan tidak hanya diperlukan dalam infrastruktur fisik dan kualitas pendidikan, tetapi juga dalam sikap sosial dan kebijakan yang mendukung keragaman dan inklusivitas dalam pendidikan di Indonesia (Sukatmi & Apriyansyah, 2023). Program Kota Ramah Anak di berbagai wilayah Indonesia telah menunjukkan hasil yang bervariasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komitmen pemerintah daerah dan ketersediaan sumber daya. Penelitian oleh

Rolobessy & Patty (2023) mencatat bahwa kabupaten atau kota yang memiliki komitmen tinggi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung anak-anak, terutama dalam memenuhi hak-hak mereka, cenderung lebih berhasil dalam melaksanakan program secara efektif. Hal ini terlihat dari upaya mereka dalam mengembangkan kebijakan inklusif dan memprioritaskan kelompok anak-anak yang rentan, termasuk anak-anak dengan disabilitas (Rolobessy & Patty, 2023).

Hal ini ditekankan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Ramah Anak (KLA). Namun, implementasi kebijakan ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, yang memerlukan komitmen dan integrasi sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak (Swadesi dkk., 2020).

Kota Surabaya merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang menunjukkan komitmen kuat dalam memenuhi Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan anak. Berdasarkan informasi dari surabaya.go.id (14 November 2023), Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten berupaya mewujudkan visi sebagai kota ramah anak. Sementara itu, antaranews.com (18 September 2023) memberitakan bahwa perlindungan serta pemenuhan hak anak, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus di lembaga pendidikan, masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana-prasarana dan minimnya pelatihan bagi guru. Meski demikian, pemenuhan hak anak disabilitas tetap menjadi prioritas, sehingga pemerintah

diharapkan terus berinovasi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif bagi semua anak.

Ketentuan mengenai perlindungan anak di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada Pasal 16A, ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam huruf 1. Selain itu, ayat (1) dan (3) Pasal 16A menekankan bahwa aturan perlindungan anak menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat demi kepentingan anak. Perlindungan anak yang menjadi perhatian pada bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 10 Ayat 1-5 yang digaris bawahi yaitu:

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi anak;
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah sampai tamat;

- (3) Selain tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku wajib memberikan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- (4) Dalam hal Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan korban bencana alam dan/atau bencana sosial atau Anak dari korban bencana alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dengan layanan khusus;
- (5) Dalam hal Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Anak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar secara inklusif atau secara khusus.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang terdaftar di sekolah dasar dan menengah pertama inklusif di Surabaya masih relatif rendah dibandingkan dengan total populasi anak usia sekolah di kota tersebut. Situasi ini mencerminkan kesenjangan antara upaya yang telah dilakukan dan kenyataan di lapangan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas.

Tantangan lainnya meliputi keterbatasan fasilitas pendidikan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dengan disabilitas, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Layanan kesehatan inklusif, seperti

terapi fisik, terapi psikologis, dan dukungan emosional, masih belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Surabaya. Selain itu, layanan dukungan psikososial yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan disabilitas juga terbatas, yang memperparah kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain tantangan infrastruktur, hambatan lain yang sangat penting adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusi bagi anakanak dengan disabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani dkk., 2024) menunjukkan bahwa partisipasi anak-anak dengan disabilitas dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan rekreasi di Surabaya masih sangat terbatas. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan anak-anak dengan disabilitas mengalami eksklusi sosial, yang pada akhirnya menghambat potensi mereka untuk berkembang secara optimal dalam lingkungan yang inklusif.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan di Surabaya untuk meningkatkan kolaborasi dalam mengatasi tantangan-tantangan ini. Upaya bersama untuk meningkatkan infrastruktur, menyediakan layanan yang lebih inklusif, dan mendidik masyarakat tentang pentingnya inklusi akan menjadi langkah kunci untuk memastikan bahwa hak-hak anak dengan disabilitas terpenuhi secara optimal di kota ini. Pendidikan inklusif memainkan peran penting dalam mempromosikan hak yang sama bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Konsep pendidikan inklusif tidak hanya mencakup akses bagi anak-anak dengan disabilitas ke sekolah umum, tetapi juga melibatkan penyesuaian kurikulum, fasilitas, dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan mereka (Nadhiroh & Ahmadi, 2024). Selain itu, pendidikan inklusif juga

berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak dengan disabilitas, sehingga mereka dapat belajar dan berpartisipasi secara setara dengan anak-anak lain tanpa mengalami diskriminasi.

Salah satu kebijakan yang mendukung anak-anak dengan disabilitas adalah pendirian Rumah Anak Prestasi (RAP), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menekankan pentingnya memberikan hak yang sama bagi anak-anak dengan disabilitas melalui fasilitas yang khusus disediakan untuk mendukung pengembangan potensi mereka. Rumah Anak Prestasi (RAP) melambangkan komitmen kota dalam memperluas akses bagi anak-anak dengan disabilitas untuk memperoleh hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan dan perlindungan sosial. Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar dan terpenting di Indonesia, telah mengambil berbagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi anak-anak, terutama yang memiliki disabilitas. Pemerintah kota berupaya memastikan setiap anak mendapatkan haknya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan ini.

Aspek ini sangat relevan dalam konteks kebijakan Kota Ramah Anak, di mana pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan disabilitas, menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah yang menerapkan konsep ini harus memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas tidak hanya diterima di sekolah umum, tetapi juga mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengoptimalkan perkembangan potensial mereka. Hal ini meliputi pelatihan

khusus bagi guru, penyediaan fasilitas yang dapat diakses secara fisik, serta penerapan pendekatan pengajaran yang lebih inklusif dan personal.

Dalam konteks ini, Kota Surabaya, melalui Rumah Anak Prestasi (RAP), memberikan contoh yang baik dalam menyediakan fasilitas ramah disabilitas dan melibatkan anak-anak dengan disabilitas dalam berbagai kegiatan pengembangan diri. RAP tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang bagi anak-anak untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Dengan fasilitas seperti RAP, diharapkan anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat meraih kesuksesan dan mengembangkan potensi mereka tanpa terhalang oleh hambatan fisik atau sosial, sehingga mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat (Pramesti & Wibawani, 2024). Program ini juga menunjukkan bahwa ketika masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dalam mendukung pendidikan inklusif, anak-anak dengan disabilitas dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan dan pengembangan diri.

Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Eva Rachmawati, menyatakan bahwa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendirikan Rumah Anak Prestasi (RAP) sebagai bentuk upaya dalam memenuhi hak-hak anak di Kota Pahlawan.

kominfo.jatimprov.go.id - "Melalui edukasi, wawasan, pelatihan, dan informasi yang diberikan, diharapkan anak-anak penyandang disabilitas di Surabaya dapat lebih produktif serta mampu meraih prestasi yang membanggakan,"- Ujar Eva

Sumber: <a href="https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/rumah-anak-prestasi-contoh-pemenuhan-hak-anak-di-surabaya">https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/rumah-anak-prestasi-contoh-pemenuhan-hak-anak-di-surabaya</a>, diakses pada 31/07/2024.

Rumah Anak Prestasi (RAP) berperan sebagai pusat pelayanan pendidikan dan rehabilitasi bagi anak-anak penyandang disabilitas di Surabaya. Fasilitas ini menyediakan pendidikan formal yang didukung oleh pelatihan keterampilan khusus, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu. Programprogram ini mencakup berbagai bidang keterampilan, mulai dari keterampilan hidup mandiri hingga pengembangan bakat di bidang seni dan olahraga. Selain itu, Rumah Anak Prestasi (RAP) juga berfungsi sebagai ruang sosial bagi anak-anak disabilitas untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian mereka, serta memperkuat interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya (Pramesti & Wibawani, 2024).

Keberadaan Rumah Anak Prestasi (RAP) sangat penting dalam mendukung program Kota Layak Anak di Surabaya, terutama bagi anak-anak dengan disabilitas yang sering kali menghadapi hambatan struktural dan sosial dalam mengakses pendidikan dan layanan publik. Dalam hal ini, Rumah Anak Prestasi (RAP) menjadi model yang berperan aktif dalam mendukung pendidikan inklusi dan kesetaraan kesempatan bagi semua anak (Dewi Pamungkas, 2023). Keberhasilan Rumah Anak Prestasi (RAP) dalam mendukung pendidikan inklusi dan rehabilitasi telah diakui secara luas. Salah satu indikator kesuksesan tersebut adalah meningkatnya jumlah anak penyandang disabilitas yang mampu mengikuti pendidikan formal di sekolah-sekolah umum serta meraih prestasi di berbagai bidang, mulai dari akademik hingga non-akademik, termasuk olahraga, seni, dan keterampilan khusus lainnya (Setiyowati dkk., 2024). Selain prestasi pendidikan, RAP juga menjadi wadah untuk mengasah keterampilan hidup mandiri bagi anak-anak, mempersiapkan mereka

untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Narasi yang disampaikan dalam rri.co.id Radio Republik Indonesia sebagai berikut.

rrri.co.id - "Keberadaan Rumah Anak Prestasi Kedung Cowek ini semakin melengkapi fasilitasi Pemkot Surabaya terhadap anak inklusi, yang sebelumnya sudah ada. Anak-anak bisa semakin percaya diri, serta mengeksplor bakat mereka. Dan sesama orang tua bisa saling menguatkan yang kemudian berdampak baik pada hasil karya mereka yang semakin bagus dan memiliki nilai jual yang tinggi,"

Sumber: <a href="https://www.rri.co.id/daerah/548344/pemkot-surabaya-resmikan-rumah-anak-prestasi-kedung-cowek">https://www.rri.co.id/daerah/548344/pemkot-surabaya-resmikan-rumah-anak-prestasi-kedung-cowek</a>, diakses pada 07/02/2024.

Rumah Anak Prestasi (RAP) adalah pusat yang dirancang untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan anak-anak penyandang disabilitas melalui berbagai layanan dan fasilitas, seperti terapi wicara, terapi akupuntur, terapi perilaku dan okupasi, serta pelayanan kesehatan yang mencakup dokter umum dan spesialis, fisioterapi, serta ruang untuk kegiatan kreatif seperti melukis, menjahit, membatik, musik, dan modelling (Azzahra dkk., 2024). Selain itu, RAP juga menyediakan pembelajaran dan konseling, minimarket, serta mushola sebagai tempat ibadah.

Rumah Anak Prestasi merupakan program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan fasilitas dan layanan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Di Kota Surabaya sendiri, terdapat empat Rumah Anak Prestasi, namun Rumah Anak Prestasi Kedung Cowek memiliki keistimewaan dibandingkan tiga lokasi lainnya. Keunggulan yang dimiliki terletak pada adanya layanan kesehatan mata dan THT yang tidak tersedia di Rumah Anak Prestasi lainnya. Layanan kesehatan ini sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas. Jika harus melakukan pemeriksaan mata atau THT di rumah sakit negeri, biasanya dibutuhkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun, tidak semua masyarakat

memiliki BPJS, dan bagi yang tidak terdaftar, harus mencari alternatif lain di rumah sakit swasta yang memerlukan biaya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Keberadaan layanan kesehatan mata dan THT di Rumah Anak Prestasi Kedung Cowek memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Masyarakat cukup menggunakan Kartu Keluarga Surabaya (KKS) untuk mengakses layanan ini tanpa biaya tambahan. Hal ini tentu sangat membantu, terutama bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas dan membutuhkan layanan kesehatan yang mudah diakses serta terjangkau. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan dan fasilitas yang tersedia di Rumah Anak Prestasi Kedung Cowek, serta bagaimana layanan ini berkontribusi dalam meningkatkan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya.

Salah satunya adalah fasilitas tambahan yang mencakup layanan konsultasi mata dan THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan), yang tidak ditemukan di RAP Nginden, Sonokwijenan, dan RAP Dukuh Menanggal. RAP Kedung Cowek diharapkan dapat memberikan progres yang luar biasa dalam mendukung perkembangan potensi anak-anak penyandang disabilitas. Narasi yang disampaikan dalam liputan6.com sebagai berikut.

Liputan6.com- "Dua RAP sebelumnya, yakni RAP Nginden Semolo dan RAP Sonokwijenan memiliki progres yang luar biasa. Sedangkan di RAP Kedung Cowek, terdapat tambahan fasilitas berupa telinga hidung tenggorok (THT), dance, hingga kelas Bahasa Inggris.,"

Sumber: <a href="https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5524727/rumah-anak-prestasi-kedung-cowek-ruang-kreasi-bagi-penyandang-disabilitas-di-kota-surabaya">https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5524727/rumah-anak-prestasi-kedung-cowek-ruang-kreasi-bagi-penyandang-disabilitas-di-kota-surabaya</a>, diakses pada 09/02/2024.

RAP Neinden

I. It. Nighted sensitivity is the schedule state of the International Color Sensitivity is the Schedule state of the International Color Sensitivity is the Schedule state of the International Color Sensitivity is the Schedule state of the International Color Sensitivity is the Schedule state of the International Color Sensitivity is the International Col

Gambar 1.2 Brosur Rumah Anak Prestasi Sumber : Brosur Program Rumah Anak Prestasi, 2024

Program Rumah Anak Prestasi (RAP) merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan anak-anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Program ini dirancang untuk menciptakan fasilitas yang ramah dan inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian ini berfokus pada kebijakan Program Rumah Anak Prestasi (RAP) dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Rumah Anak Prestasi Kedung Cowek. Penelitian ini mencakup berbagai tahapan kebijakan, seperti proses perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan fasilitas, serta bagaimana fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyediaan fasilitas yang dirancang dalam kebijakan RAP agar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Program Rumah Anak Prestasi Kedung Cowek dalam menyediakan layanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Surabaya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dari rumusan masalah adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Program Rumah Anak Prestasi Kedung Cowek dalam menyediakan layanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Surabaya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai Program Rumah Anak Prestasi dalam menyediakan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi pengembangan teori maupun studi lanjutan terkait kebijakan layanan inklusif dan pengembangan fasilitas bagi penyandang disabilitas di masa mendatang.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

## 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini merujuk pada berbagai studi sebelumnya sebagai landasan untuk memperjelas batasan dan memperkuat dasar penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik digunakan sebagai acuan untuk

memahami relevansi, memperluas wawasan, serta mengidentifikasi perbedaan dengan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang dijadikan referensi adalah sebagai berikut:.

# 2) Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan tambahan yang berharga, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang mengkaji isu serupa.

# 3) Bagi Instansi Pemerintah Kota Surabaya

Penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi Dinas Sosial Kota Surabaya, khususnya terkait kebijakan dan pelaksanaan Program Rumah Anak Prestasi di Kedung Cowek, sehingga dapat meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas.